

# Zulkarnaen Akan Turun ke Lapangan

## ► Bantah Ada Pungli di Pasar Tradisional

**BATAM, TRIBUN** - Perihal adanya keluhan pengelola pasar terkait pungutan liar (Pungli) di pasar tradisional, Kepala Bidang (Kabid) Pasar, Zulkarnaen mengatakan sebenarnya tidak ada pungutan liar. Karena pasar tradisional itu hanya 2 yaitu pasar Hangtuhah Batu Besar dan Pasar Seroja Sagulung.

"Kalau terkait retribusi pasar hanya 2 saja yang kita pungut selama ini, terhadap adanya pemberitaan kemarin itu, itu adalah pasar Sukaramai yang dikelola oleh pihak swasta," kata Zulkarnaen kepada Tribun, Selasa (10/4).

Kendatipun demikian, pasar tersebut juga menjadi binaan Disperindag Kota Batam. Ia mengakui selama ini pungutan yang ada hanya sampah dan parkir.

"Hal itu resmi karena ada bukti kar-

cisnya. Sementara kami dari Disperindag bidang pasar selama inikan sudah melakukan pembayarannya non tunai. Sudah pakai kartu. Kalau ada pungli kami pasti bertindak tegas kalau sudah ketahuan," tegasnya.

Ia menyebut intinya tak ada pungli di pasar tradisional. Kalau itu berkaitan dengan OPD lain seperti sampah, parkir. Kalau diduga seperti itu, Disperindag pasti akan tindaklanjuti.

"Soal pengawasan itu ada timnya. Dan kami akan turun minggu ini untuk melihat kepastiannya. Ada atau tidak bukti tersebut," tuturnya.

Jika sudah pasti ada pungli, Disperindag akan segera turun. Dan Pemko pasti tindaklanjuti. (rus)

# WFQR Temukan Minyak Hitam

► Menyebar di Pulau Kubung Ngenang ► Lanal Masih Selidiki Pembuang Limbah

**BATAM, TRIBUN** -Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Lanal Batam dengan Patkamla Silumba dan Posal Telaga Punggur menemukan pencemaran limbah minyak berwarna hitam di perairan dan pantai dan sungai Pulau Kubung Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Penemuan limbah minyak tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyampaikan ada warga Pulau Kubung melihat limbah minyak hitam yang mencemari perairan dan pantai.

Pencemaran minyak itu sangat mengganggu aktivitas nelayan serta warga dan berharap instansi terkait segera dapat mengetahui asal dari limbah tersebut sehingga kedepannya tidak terjadi lagi.

"Dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya personel Posal Telaga Punggur dan Unit Intelijen Lanal Batam menggunakan Patkamla Silumba bersama dengan Tim WFQR Lantamal IV segera merespon menuju ke lokasi," kata Komandan Lanal (Danlanal) Batam Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan, Selasa (10/4).

Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan mengatakan pihaknya langsung melakukan penyisiran sekitar perairan Pulau Ngenang, Pulau Kasam, Pulau Todak dan Bagan. Di lokasi terlihat limbah tersebut bertinggal sisa-sisa. Selanjutnya di bagian tempat lain terlihat sudah tidak ada lagi limbah minyak yang dikeluhkan warga.

"Dugaan sementara berdasarkan pengecekan di lapangan dapat dimungkinkan minyak tersebut merupakan limbah mi-



● ke halaman 19

**TEMUKAN LIMBAH** - Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Lanal Batam dengan Patkamla Silumba dan Posal Telaga Punggur menemukan pencemaran. Mereka temukan limbah minyak berwarna hitam di perairan dan pantai dan sungai Pulau Kubung Kelurahan Ngenang.

# WFQR Temukan

Sambungan Hal.13

nyak bekas atau kapal yang melaksanakan kegiatan pembersihan tangki kotor pada saat malam hari yang berada di OPL. Sehingga pada saat air pasang limbah minyak tersebut terbawa arus ke pantai," katanya.

Iwan Setiawan mengatakan saat ini Tim WFQR telah mengambil sampel limbah minyak tersebut untuk dilaksanakan pengecekan untuk mengetahui jenis minyak dan penyelidikan lebih lanjut. Disamping itu, Lanal Batam te-

lah melaksanakan pemetaan terhadap lokasi atau wilayah yang rawan terjadinya pencemaran limbah minyak yang diakibatkan oleh kapal-kapal yang membuang minyak bekas di wilayah kerja Lanal Batam.

"Selanjutnya Lanal Batam akan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dan bertanggung jawab mengenai permasalahan limbah minyak ini. Kami juga bersama Lantamal IV dan Lanudal serta Wing Udara TNI AL

telah melaksanakan patroli dan monitoring udara melaksanakan pemetaan terhadap titik temuan limbah minyak," ujarnya.

Selain itu Lanal Batam bersama Lantamal IV juga akan mengintensifkan patroli dan memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal di OPL yang dicurigai dapat melakukan aktivitas pencemaran limbah minyak yang akan berdampak buruk bagi lingkungan perairan Kepri, termasuk menindak keras. **(bur)**

# Pungutan di Internal tak Mungkin Kami Urusi

## ► Yusfa Sebut Biaya Penyusutan Masuk ke Tarif Taksi

**BATAM, TRIBUN** - Permasalahan taksi konvensional yang banyak pungutan-pungutan yang terjadi, menurut Dinas Perhubungan, pemerintah tak bisa menjamin pungutan tersebut dihapuskan atau diminimalisir. Terkait tarif taksi itu sudah diatur dalam Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

BOK itu dihitung berdasarkan beberapa item, misalnya harga kendaraan, harga sukucadang, harga penyusutan, tingkat inflasi, BBM, dan lain sebagainya. Itulah dihitung sebagai biaya operasional kendaraan. Kemudian didapatkan harga satuan perkilometranya. Jadi biayanya juga tak mahal dan masih mampu bersaing.

"Itulah yang ditetapkan sebagai tarif yang diterap-



**Itukan semacam kesepakatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mereka buat sendiri. Bukan acuan pemerintah, jadi jelas tak ada kaitannya**

**YUSFA HENDRI**

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam

kan selama ini. Apabila ada biaya-biaya lain selain itu, tak dimasukkan ke da-

lam biaya tarif tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri kepada *Tribun*, Selasa (10/4).

Yusfa mengatakan pemerintah hanya mengurus retribusi peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga ada Perdanya KIR. Taksi konvensional harusnya sudah sesuai dengan Permenhub 108 itu harus membayar KIR.

Sementara hal-hal yang lain, seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat sendiri oleh badan usahanya, itu menjadi urusan internal perusahaan mereka sendiri. Kalau misalnya



**Yusfa Hendri**

ada iuran kopersinya, iuran pangkalan, dan biaya lain di luar ketentuan-ketentuan itu, pemerintah tak bisa melakukan pengaturan sampai hal-hal seperti itu.

"Itukan semacam kesepakatan berdasarkan ke-

putusan-ketentuan yang mereka buat sendiri. Bukan acuan pemerintah, jadi jelas tak ada kaitannya," kata Yusfa.

Kemudian, ia melanjutkan, kalau ada penumpang dibohongi soal tarif silahkan laporkan atau komplain saja. Pastinya tak akan bisa berbohong karena pakai argo.

"Kalau biaya-biaya lain itu dihapus atau diminimalisir, ibarat suatu perkumpulan buat arisan, masak kita ingin atur. Mana bisa. Kebijakan internal diserahkan kepada mereka.

Berbeda dengan taksi online. Dimana tarif mereka ditetapkan oleh aplikasi. Sebenarnya kalau dihitung, aplikasi menetapkan tarif semurah itu, karena apa, pengemudi online menerima insentif sebagai keuntungan mereka lagi.

"Padahal sebenarnya biaya penyusutan, BBM, kerusakan kendaraannya, pajak tahunannya dan lainnya itu ditanggung sendiri oleh pengemudi online. Tak jadi tanggung jawab aplikasi. Jadi berbeda dengan kendaraan umum," tuturnya. (rus)



TRIBUN/IST

**TINJAU JERAMBAH**- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, bersama uspika Kecamatan Batuampar meninjau jerambah beton di Batumerah, Selasa (10/4). Lewat program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) tahun 2017 jerambah ini dibangun.

## Sepuluh Tahun Menanti Akhirnya Terkabul

### ► Jalan di Palem Raya Sengkuang Disemenisasi

**BATAM, TRIBUN** - Masyarakat Perumahan Palem Raya Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batuampar merasa senang. Setelah sepuluh tahun jalan yang mereka dambakan di perumahan mereka akhirnya selesai dikerjakan. Semenisasi jalan ini dibangun melalui program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) tahun 2017. Perwakilan warga mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang telah mengalokasikan anggaran untuk program PIK setiap tahunnya untuk kegiatan.

Warga juga mengatakan bahwa alat berat amfibi untuk menggali parit juga te-

lah masuk dan mulai bekerja. Warga juga berencana untuk melukis jalan yang ada di perumahan itu agar menjadi lebih menarik. Permintaan lain yang disampaikan warga agar dibangun pagar pembatas di bagian belakang perumahan. Ini sangat perlu mengingat pernah terjadi kehilangan di salah satu rumah warga yang ada di sana.

"Kami warga perumahan Palem Raya sudah bisa menikmati jalan lingkungan yang layak setelah menunggu selama sepuluh tahun," ucap seorang warga kepada Wali Kota dalam acara pertemuan program PM-PIK Kecamatan Batuampar, Selasa (10/4).

Selain warga perumahan Palem Raya, masyarakat di Kelurahan Batu Merah juga bersyukur dengan dibangunnya Pelantar atau Jerambah Beton di RT 005 RW 006. Dengan dibangunnya Jerambah Beton itu, masyarakat Kelurahan Batu Merah sudah bisa merasakan manfaat secara langsung. Jerambah sepanjang 70 meter ini dibangun melalui anggaran PM-PIK Tahun 2017. Kelurahan Batu Merah memperoleh 14 kegiatan PIK tahun 2017 lalu dan ditahun 2018 mendapat 26 kegiatan PIK.

Masyarakat juga meminta agar di lingkungan mereka dibangun sekolah negeri dari tingkat SD, SMP dan SMA. Yang lebih prioritas adalah status lahan Kampung Tua Batu Merah yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Warga juga menyampaikan agar Pemko Batam menertibkan keberadaan warnet yang telah membuat resah orang tua di sana. Warga mendesak agar status lahan ini dapat segera diberikan agar menjadi hak milik.

Usai berdialog dengan warga kelurahan Batu Merah, Wali Kota melanjutkan peninjauan ke Kelurahan Sungai Jodoh. Di Kelurahan Sungai Jodoh terdapat 8

kegiatan PM-PIK yang dikerjakan tahun 2017. Salah satunya yang disyukuri warga adalah semenisasi jalan yang telah dikerjakan tahun 2017 lalu. Dengan dilakukannya semenisasi ini dampaknya sangat dirasakan warga sekitar. "Jika tidak ada pemberdayaan dari pemerintah jalan perumahan ini masih hancur kondisinya sampai saat ini. Kami masyarakat RW 05 Kelurahan Sungai Jodoh sangat berterimakasih," katanya.

Di Kelurahan Kampung Seraya, Wali Kota beserta rombongan meninjau gedung serba guna di RT 001/RW 001 Kampung Seraya. Tak lupa warga mengucapkan terimakasih atas seluruh pembangunan yang dilakukan melalui program PM-PIK yang dilakukan Pemko Batam. Menanggapi apa yang disampaikan warga, Wali Kota berkomitmen terus menganggarkan melalui APBD kegiatan PM PIK. Program percepatan infrastruktur ini menurutnya tidak hanya dilakukan di tingkat kelurahan tetapi juga tingkat kota. Pemko Batam sejak tahun lalu telah memulai pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Batam bagian timur.

"Saya berharap ada peru-

bahan di tempat mendasar seperti perumahan dan pasar. Keinginan saya mengembalikan Batam menjadi kota yang maju agar orang datang berkunjung ke Batam," kata Wali Kota memberi penjelasan kepada warga.

Wali Kota mengatakan bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur ini telah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Setiap tahun dana yang dianggarkan meningkat menjadi Rp1 miliar di tahun 2017. Di tahun 2018 Pemko Batam telah menganggarkan sebesar Rp1,1 miliar selanjutnya di tahun 2019 direncanakan dianggarkan Rp1,3 miliar melalui APBD. Menurutnya apabila usulan yang menjadi skala prioritas supaya dapat diusulkan melalui Musrenbang.

Persoalan lahan kampung tua menurutnya adalah salah satu hal yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Menurutnya sudah saatnya pengelolaan lahan di Kota Batam diserahkan ke Pemerintah Daerah, sehingga status kepemilikan lahan di Kota Batam bisa menjadi hak milik dan masyarakat tidak menyewa kepada negara. Untuk menyelesaikan persoalan lahan ini, ia berjanji agar segera menuntaskan se-

belum masa jabatannya berakhir. Terkait pembangunan sekolah, Wali Kota menolak jika membangun di area laut.

"Kita memang tidak punya lahan bapak/ibu. Oleh karena itu doakan semoga Presiden segera menandatangani Kepres, sehingga urusan kemasyarakatan bisa diserahkan kepada Pemko Batam," sebutnya.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, salah satu langkah yang diambil adalah dengan menjadikan Batam sebagai kota wisata. Diyakini dengan dibangunnya Batam akan banyak orang yang datang berkunjung sehingga terjadi perputaran uang di Kota Batam.

"Target saya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 1,5 juta meningkat menjadi 3 juta. Itu bisa terwujud jika kota ini kita bangun jalannya, tempat wisatanya kita siapkan. Yakinlah orang akan datang dengan sendirinya ke Batam. Pantai di Nongsa akan saya buat seperti pantai yang ada di Bali. Jika orang sudah datang ke Batam berapa banyak uang yang akan berputar di Batam. Ini menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan PAD Kota Batam," jelas Rudi. (\* /hat)

# Jadi Dorong Pembentukan Biro Pariwisata

## ► Agenda Penting Dalam Rapimkot Kadin Batam

**BATAM, TRIBUN** - Kadin Batam dorong pemerintah, khususnya BP Batam dalam mempercepat pembentukan biro pariwisata. Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan pembentukan biro pariwisata tersebut perlu untuk menunjang seluruh agenda pariwisata di Batam.

Pembentukan biro pariwisata itu menjadi satu dari beberapa rekomendasi penting yang akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Kota Kadin Batam.

Rapimkot Kadin Batam sendiri rencananya akan dilaksanakan di Best Western Panbil Hotel Batam pada 12 April mendatang.

"Ini jadi satu agenda penting kami dalam rapimkot nanti. Menurut kami, percepatan pembentukan Biro Pariwisata yang setingkat dengan Direktorat ini perlu untuk semakin memperkuat pengembangan sektor pariwisata," ujarnya.

Mengingat, sektor pariwisata sendiri menjadi harapan di tengah kelesuan perekonomian dan sektor industri yang terjadi di Batam saat ini.

"Untuk mengembangkan sektor pariwisata ini tidak bisa mendadak saja. Apalagi kita tahu dari awal Batam dibentuk untuk kawasan industri manufaktur dan industri galangan kapal," ucapnya.

Walaupun diakuinya, founding father Batam yaitu BJ Habibie, sebelumnya sudah melihat potensi pariwisata di Batam. Namun hingga saat ini potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal.

Menurutnya, pembentukan Biro Pariwisata yang tengah digodok oleh BP Batam sekarang, tak lepas dari ide awal yang diberikan oleh Kadin Batam.

"Ide ini sendiri sudah kami suarakan dari mulai saya menjabat sebagai Ke-

tua Kadin. Tapi baru dapat terealisasi di era kepemimpinan pak Lukita. Oleh karena itu, Biro Pariwisata ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas bersama, dimana kami juga merupakan partner kerja dari Pemko Batam dan BP Batam," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rapimkot Kadin Batam, Suyono menjelaskan ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi di dalam rapimkot itu.

"Yang utama adalah masalah kondisi Kota Batam, serta masalah ekonomi Batam. Hal ini terkait kepastian hukum dalam perubahan status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," kata Suyono.

Termasuk juga mengenai persoalan ketenagakerjaan, upah, serta mengenai pemberdayaan dan pengembangan UMKM. (ane)

# Warga Lubuk Baja Bisa Ambil KTP

▶ Enam Ribu Permohonan Selesai Dicitak

**BATAM, TRIBUN** - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam telah menyelesaikan pencetakan KTP-el enam ribuan lebih permohonan KTP-el di Kecamatan Lubuk Baja. Warga diimbau agar segera mengecek dan mengambil di kantor Kecamatan Lubuk Baja. Kepala Disdukcapil Kota Batam Said Khaidar menuturkan, permohonan pencetakan KTP-el di Kecamatan Lubuk Baja beberapa hari ini, sudah selesai dicetak sebanyak enam ribu lebih permohonan dan akan diserahkan ke Kecamatan Lubuk Baja.

"Untuk permohonan pencetakan KTP-el di Kecamatan Lubuk Baja sudah kita selesaikan, dan diimbau masyarakat agar segera melakukan pengecekan dan mengambil ke Kecamatan Lubuk Baja," jelasnya, Selasa (10/4).

Dia juga menyampaikan, selain Kecamatan Lubuk Baja, saat ini pihaknya lagi proses penyelesaian permohonan pencetakan KTP-el di Kecamatan Seibeduk dan Sekupang. Dengan menggunakan 16 ribu keping blangko KTP-el yang diterima bebe-

rapa waktu lalu.

"Kami saat ini juga tengah mengejar penyelesaian pencetakan KTP-el di Kecamatan Seibeduk dan Sekupang. Dan mungkin Kecamatan Seibeduk ini nantinya akan kita selesaikan satu atau dua minggu lagi," katanya.

Dia juga menambahkan, di tengah dua kecamatan dalam proses penyelesaian pencetakan KTP-el, pihaknya juga sudah menyusulkan penambahan blangko KTP-el ke pusat, sehingga ketika dalam proses penyelesaian pencetakan masih kurang, sudah langsung ada penambahan yang diterima dari pusat.

"Hal ini kita lakukan agar target yang sebelumnya diberikan Pak wali selesai bulan Mei dapat tercapai," terangnya.

Dia berharap kepada masyarakat Kota Batam, agar dapat melakukan pengecekan dan mengambil KTP-el di tiap kecamatan yang sudah diselesaikan pencetakan KTP-elnya oleh Disdukcapil, sehingga KTP-el di kecamatan tidak mengalami penumpukan. (als)



TRIBUN/IST

**FOTO BERSAMA**- Wali Kota Batam, Rudi berfoto bersama dengan masyarakat usai mengunjungi pelaksanaan PM-PIK tahun anggaran 2017 di Kecamatan Sekupang, Senin (9/4).

## Fokus Bangun Jalan dan Drainase

► Tiap Kelurahan Dapat Dana PIK Rp 1,1 Miliar

**BATAM, TRIBUN** - Pemerintah Kota Batam fokuskan program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi jalan lingkungan dan drainase. Hal ini disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat meninjau pelaksanaan PM-PIK tahun anggaran 2017 di Kecamatan Sekupang, Senin (9/4).

"Permintaan banyak, tapi saya ambil yang terbanyak. Yang terbesar itu jalan setapak, drainase, maka Perwako saya buat dua itu. Kalau mau ditambah silahkan, misal jadi lima item, tapi yang terbesar saja. Kalau semua masuk, pusing nanti. Nanti posyandu, poskamling, gedung serbaguna mau masuk juga," kata Rudi.

Melalui program PM-PIK ini Rudi menargetkan jalan lingkungan bisa selesai di akhir masa jabatannya. Supaya pembangunan merata, tak hanya di

jalan-jalan utama.

"Kebijakan saya harus di atas Rp 1 miliar dana PIK ini. Karena dari 2011 saya Wakil Wali Kota, keluhan Bapak Ibu itu saja, jalan berlubang, parit banjir. Maka jatah Bapak Ibu tidak saya kurangkan," ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok kerja. Sedangkan dinas, kecamatan, dan kelurahan hanya pendampingan, mengawasi, dan membantu dalam hal pelaporan karena dari APBD.

Pekerjaan di lingkungan ini, tidak lagi dilaksanakan oleh dinas Pemko Batam karena volume kerja mereka sudah cukup besar. Selain itu dengan PM-PIK, masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan.

"Saya haruskan yang mengerjakan masyarakat. Karena ini akan membantu ekonomi Bapak Ibu," kata mantan anggota DPRD ini.

Rudi berharap untuk PM-PIK 2018

sudah mulai dikerjakan pada Juli mendatang. Agar pelaksanaannya selesai tepat waktu. Adapun besar anggaran yang disiapkan tahun ini senilai Rp 1,1 miliar per kelurahan.

"Dulu pikir susah Rp 1,1 miliar. Ternyata bisa juga. Tahun depan kita paksakan Rp 1,3 miliar. Terkadang dipaksa itu perlu juga, tapi harus tepat," kata dia.

Adapun jumlah kegiatan PIK di Sekupang pada tahun anggaran 2017 sebanyak 67 proyek. Terbagi di Kelurahan Tiban Indah 7 kegiatan, Tiban Lama 14 kegiatan, Patam Lestari 9 kegiatan, Sei Harapan 15 kegiatan, Tiban Baru 6 kegiatan, Tanjungriau 13 kegiatan, dan Tanjungpinggir 3 kegiatan. Bentuk kegiatannya antara lain pembangunan/rehabilitasi jalan, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan/rehabilitasi drainase, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah. (\* /hat)